

ABSTRAK

Pemerintah wajib melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam menyusun laporan keuangan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Penerapan akuntansi beban dan belanja barang. Akuntansi beban dan belanja barang memiliki nilai krusial terkait kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk mencukupi kebutuhan operasional pegawai. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan peninjauan atas penerapan akuntansi pos belanja khususnya belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan beban dan belanja barang pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan observasi. Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan terkait pengakuan, prioritas penganggaran belanja pada tahun 2020 adalah belanja operasi dengan alokasi anggaran terbesar. Belanja operasi yang menjadi prioritas adalah belanja pegawai dengan jumlah anggaran terbesar dan belanja barang dan jasa yang memiliki persentase realisasi terbesar. Pada Pelaksanaan praktik akuntansi belanja dan beban barang pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau mulai dari pendefinisian dan pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci: beban dan belanja barang, standar akuntansi pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota

ABSTRACT

The government is obligated to prepare financial reports for the government, regional governments and the central government based on the Government Accounting Standards. In preparing financial statements, one of the things that must be considered is the application of expense accounting and goods

expenditures. Accounting for expenses and goods expenditures has a crucial value in terms of the smooth implementation of government tasks to meet the operational needs of employees. This makes the authors interested in conducting a review of the application of postal accounting, especially shopping for goods at the Regional Apparatus Organization of the Civil Service Police Unit of the Lubuklinggau City Government. This study was conducted with the aim of knowing the recognition, measurement, presentation, and disclosure of expenses and goods expenditures at the Regional Apparatus Organization of the Civil Service Police Unit of the Lubuklinggau City Government. Data collection methods used are literature study, interviews, and observation. Based on the data processing process carried out related to recognition, the priority for budgeting expenditures in 2020 is operating expenditure with the largest budget allocation. Operational expenditures that are prioritized are personnel expenditures with the largest total budget and goods and services expenditures which have the largest percentage of realization. In the implementation of the practice of accounting for expenditures and goods expenses at the Regional Apparatus Organization of the Civil Service Police Unit of the Lubuklinggau City Government starting from defining and classifying, recognizing, measuring, presenting and disclosing in accordance with applicable standards.

Keywords: goods expenses and expenditures, government accounting standards, Regional Apparatus Organization of Civil Service Police Unit City Government